



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MODIFIKASI CUACA, EVAKUASI KORBAN, DAN PEMBUKAAN AKSES JALAN DALAM MENGATASI DAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI

**Suhartono**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[suhartono2@dpr.go.id](mailto:suhartono2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per 30 November 2025, dampak dari bencana hidrometeorologi pada sejumlah kabupaten di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) telah menyebabkan 442 orang meninggal dunia, dan 402 orang masih hilang, 23 kabupaten/kota terdampak dan puluhan ribu harus mengungsi. BNPB memperkirakan bahwa korban masih akan terus bertambah karena beberapa wilayah belum terjangkau kegiatan evakuasi dan penyaluran bantuan baik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) maupun BNPB. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada periode 25–27 November 2025 beberapa kota/kabupaten di wilayah-wilayah tersebut mengalami hujan dengan intensitas ekstrem termasuk di antaranya Aceh Utara, Aceh (310.8 mm/hari), Medan, Sumatra Utara (262.2 mm/hari), Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (229.7 mm/hari), dan Padang Pariaman, Sumatra Barat (154 mm/hari).

Bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir pesisir, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang di tiga provinsi tersebut disebabkan oleh terbentuknya Siklon Tropis Senyar dari Bibit Siklon 95B. Sejak 26 November 2025 pukul 07.00 WIB BMKG telah memantau terbentuknya Siklon Tropis Senyar dan memberikan peringatan dini akan potensi peningkatan suplai air di perairan hangat Selat Malaka yang dapat memicu pertumbuhan awan konvektif menjadi hujan sangat lebat hingga ekstrem yang disertai angin kencang di bagian utara Sumatra. Untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem, BMKG telah mengimbau seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi.

Bencana hidrometeorologi yang sedang terjadi di tiga provinsi tersebut membutuhkan kegiatan tanggap darurat secara lintas sektor, terutama dalam mendukung kegiatan evakuasi yang terkendala akibat cuaca ekstrem yang terus berlangsung dan penyaluran bantuan yang terhambat akibat jalan-jalan dan jembatan penghubung ke lokasi terdampak terputus karena banjir dan tanah longsor. Sejumlah aksi tanggap darurat sedang dan sudah berjalan. *Pertama*, kegiatan modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi curah hujan di kawasan rawan bencana melalui rekayasa pengalihan awan hujan ke wilayah yang lebih aman. Kegiatan ini akan mendukung petugas *search and rescue* (SAR) dan masyarakat melakukan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penyaluran bantuan terhadap korban dan wilayah terdampak yang masih terisolir. Kegiatan modifikasi cuaca memerlukan kerja sama antara BMKG dengan BNPB untuk menentukan titik penyebaran bahan semai Natrium Klorida (NaCl) dan Kalsium Oksida (CaO) dengan menggunakan pesawat, sehingga pembentukan awan bisa dikendalikan. Melalui kegiatan ini diharapkan intensitas hujan wilayah terdampak bisa menurun sehingga mendukung upaya tanggap bencana.

*Kedua*, wilayah terdampak dan terisolir saat ini membutuhkan kecepatan pemerintah dalam membuka kembali jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor. Keterlambatan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penyaluran bantuan akan menyebabkan meningkatnya korban jiwa. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu mendukung

mobilisasi peralatan dan petugas untuk mengatasi keterputusan sejumlah akses jalan dan jembatan. *Ketiga*, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan pemerintah daerah perlu menyiapkan program relokasi permukiman dan rehabilitasi rumah warga, sarana umum, gedung sekolah dan sarana publik yang terdampak.

## Atensi DPR

Kegiatan evakuasi, pencarian dan penyelamatan harus menjadi prioritas utama dalam tanggap darurat atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Efektivitas kegiatan ini bergantung pada kolaborasi inter-sektoral yang erat, khususnya antara BMKG dengan BNPB dalam modifikasi cuaca untuk memitigasi dampak dari terbentuknya Siklon Senyar dan 95 B. Kementerian PU dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu memobilisasi alat dan petugas membantu mengatasi sejumlah jalan yang terputus untuk mendukung penyaluran bantuan dan kegiatan evakuasi. Kementerian PU, PKP, BNPB, dan Pemda perlu segera menyiapkan program rehabilitasi sarana umum dan perumahan warga serta relokasi permukiman terdampak bencana. Komisi V DPR RI perlu mendorong mitra kerja khususnya BMKG dan Basarnas meningkatkan kolaborasi antar-kementerian/lembaga untuk memaksimalkan upaya tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Kementerian PU dan Kementerian PKP perlu memobilisasi perangkat yang dimiliki untuk mengatasi jalan yang terputus, sarana umum yang rusak, dan perbaikan wilayah permukiman masyarakat yang terdampak.

## Sumber

antaranews.com, 29 November 2025;  
 bmkg.go.id 25 November 2025;  
 cnnindonesia.com, 29 November 2025;  
 detik.com, 29 November 2025;  
 kompas.com, 28 November 2025;  
 kumparan.com 30 November 2025;  
 tempo.co 27 November 2025.

Minggu ke-4 November  
(24 s.d. 30 November 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Rafika Sari  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Edmira Rivani  
 Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Ulyy Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Firyal Nabihah  
 Ulayya Sarfina  
 Yosua Pardamean S.  
 Jeffrey Ivan Vincent  
 Fauzan Lazuardi R.  
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikhah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making*